

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Taiwan, negara yang terletak di Asia Timur dan diapit oleh Selat Taiwan dan Laut Filipina¹, merupakan suatu negara yang pada awal berdiri menjadikan sektor pertanian sebagai sektor utamanya dalam bidang ekonomi. Sampai tahun 1960-an, negara ini masih diklasifikasikan sebagai negara yang terbelakang. Namun belakangan Taiwan sukses menjadi negara yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui pengembangan industri produk berteknologi tinggi yang berorientasi pada ekspor². Kesuksesan Taiwan ini bisa dilihat dari peningkatan ekonomi Taiwan yang pada tahun 1952-1960 pertumbuhan ekonomi Taiwan hanya 3,1%, namun pada tahun 1968-1973 persentase tersebut naik menjadi 7,1%³. Dengan berkembangnya industri elektronik, petrokimia, dan mesin telah memacu pertumbuhan ekonomi Taiwan sehingga diklasifikasikan sebagai salah satu negara *Asian Dragon*⁴.

Kemajuan dalam bidang ekonomi sampai saat ini belum diimbangi dengan kebijakan luar negeri yang stabil dalamanggapi isu unifikasi Cina-Taiwan, dimana

¹ *Taiwan*, Central Intelligence Agency, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tw.html#top>, diakses pada tanggal 11 Maret 2013

² Ibp Usa, *Taiwan Army, National Security and Defense Policy Handbook*, (USA: USA International Business Publications, 2009) hal 24

³ Alice H. Amsden, *Taiwan's Economic History: A Case of Etatism and a Challenge to Dependency Theory*, *Modern China*, Vol. 5, No. 3, Symposium on Taiwan: Society and Economy (Jul., 1979) hal 344

⁴ *Asian Dragon* merupakan istilah yang digunakan kepada negara yang mengalami kemajuan di bidang ekonomi. Adapun negara yang diklasifikasikan menjadi *Asian Dragon* ini adalah Hongkong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan. Dikutip dalam Anthony P. D'Costa, *Globalization and Economic Nationalism in Asia*, (Oxford: Oxford University Press, 2012) hal 2

terdapat persaingan politik yang kuat antara dua partai dominan dalam pemerintahan Taiwan, yaitu Partai Kuomintang (KMT) yang berasal dari *Pan Blue Coalition* dan *Democratic Progressive Party* (DPP) yang berasal dari *Pan Green Coalition*. Partai Demokrasi Progresif adalah partai yang berada pada titik sayap kiri tengah, berhaluan liberalis dan demokratis. Partai ini sangat menjunjung nilai-nilai hak asasi yang ditetapkan oleh masyarakat internasional. Melalui poin persamaan hak DPP menginginkan kedaulatan penuh dari Cina. Oleh karena itu mereka mendukung upaya agresif Taiwan dalam mencapai pemisahan diri. Partai Kuomintang di pihak lain dikenal sebagai partai nasionalis yang sekarang sedang berkuasa di Taiwan. Dalam beberapa tahun terakhir partai ini mendukung demokrasi, kapitalisme, dan juga unifikasi Cina sehingga mereka cenderung mencari penyelesaian dengan melakukan pendekatan ke Cina.⁵

Sejak tahun 1949, Partai Kuomintang sebenarnya telah menjadi *ruling party*⁶. Pada masa itu, Taiwan berada dalam pemerintahan yang otoriter, dimana hanya ada satu partai yang berkuasa, namun sejak akhir tahun 1980, dimulailah transisi pemerintahan yang otoriter ke arah demokrasi. Sejak itu muncullah partai – partai yang menjadi oposisi. Sayangnya hanya ada satu partai yang mampu menyaingi partai Pemerintah, yaitu Partai DPP. Sebagai partai oposisi, Partai DPP menganggap Partai KMT sebagai “penjajah⁷” yang masuk ketatanan pemerintahan Taiwan.⁸

⁵ G. Schubert, *Taiwan's Political Parties and National Identity: The Rise of an overarching Consensus*, Asian Survey, Vol. 44, No. 4 (July/August 2004), hal. 534

⁶ John F. Copper, *The Evolution of Political Parties in Taiwan*, Asian Affairs, Vol. 16, No. 1 (Spring, 1989), hal 4

⁷ Penjajah disini maksudnya adalah Partai KMT dianggap sebagai rezim asing, dimana yang bukan berasal dari pribumi Taiwan.

Isu politik Taiwan didominasi oleh persaingan dua partai yang disebabkan oleh adanya perbedaan ideologi serta kepentingan masing-masing partai. Persaingan ini juga terlihat dalam isu unifikasi Taiwan dan Cina. Kedua partai ini menarik perhatian pemerintah Cina melalui kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan terhadap isu unifikasi Taiwan-Cina. Di Taiwan sendiri unifikasi merupakan suatu isu yang sensitif karena mendatangkan akibat kepada status kenegaraan Taiwan di dunia yang belum juga jelas sampai saat ini. Apakah unifikasi atau sebuah negara yang otonom yang akan terjadi pada Taiwan sangat bergantung pada kebijakan luar negeri partai yang berkuasa.

Masa depan Taiwan juga memiliki kaitan yang erat dengan tanggapan pemerintah Cina atas isu unifikasi. Sejauh ini Cina tetap menganggap bahwa Taiwan merupakan bagian dari Cina.⁹ *Condoleezza Rice*, Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat pada masa pemerintahan G.W. Bush, menyarankan agar status Taiwan tidak ditetapkan secara sepihak oleh Cina.¹⁰ Hal ini menunjukkan Amerika Serikat, sebagai negara yang pernah berhubungan erat dengan Taiwan (ROC), menghendaki solusi damai atas permasalahan unifikasi. Namun di pihak Cina, campur tangan pihak ketiga ini dilihat sebagai faktor yang menimbulkan permasalahan ketimbang solusi. *The Taiwan Affairs Office and the Information Office of the state Council* dalam masalah “The One-China Principle and the Taiwan Issue”

⁸ *Ibid* hal 13

⁹ Hal tersebut tertuang dalam *one China policy*, dimana mengakui bahwa PRC merupakan pemerintah resmi Cina serta mengakui bahwa hanya ada satu Cina dan Taiwan merupakan bagian dari Cina.

¹⁰ *National Security Advisor Condoleezza Rice said on October 14, 2003, that “nobody should try unilaterally to change the status quo.* Shirley A. Kan, *Cina Taiwan Evolution of The One China Policy*, Congressional Research Service (August 17, 2009) hal 11, <http://fpc.state.gov/documents/organization/166825.pdf> diakses tanggal 9 November 2012

menyebutkan resolusi dari permasalahan Taiwan merupakan masalah internal Cina yang harus diselesaikan oleh Cina sendiri sehingga mereka tidak menerima bantuan dari luar¹¹.

Ketika Partai DPP memerintah Taiwan untuk pertama kali di bawah kepemimpinan Chen Shui Bian yang berkuasa pada tahun 2000-2008, kebijakan Partai DPP terhadap Cina serta gesekan yang terjadi antar partai dalam politik domestik Taiwan mulai terlihat sejak saat itu. Namun, ketika Taiwan kembali di kuasai oleh KMT, di bawah kepemimpinan Ma Ying Jeou pada tahun 2008-2012, hubungan antara Taiwan dan Cina kembali harmonis. Memburuknya hubungan Taiwan-Cina pada masa pemerintahan Chen Shui Bian, juga mendatangkan akibat kepada ekonomi Taiwan, seperti adanya tekanan Cina terhadap pebisnis Taiwan¹². selain itu adanya Pembubaran Dewan Unifikasi (*National Unification Council*) pada tahun 2006¹³. Keputusan tersebut menimbulkan berbagai reaksi di Taiwan, khususnya di level pemerintahan. Member dari koalisi *Pan Blue*, Partai Kuomintang, mengecam keputusan pembubaran Dewan Unifikasi sebagai suatu provokasi dan meningkatkan ketegangan dalam hubungan antara Taiwan dengan Beijing. Partai

¹¹ *Resolution of the Taiwan issue is an internal affair of China, which should be achieved by the Chinese themselves and there is no call for aid by foreign force. The One-China Principle and the Taiwan Issue*, http://www.Chinataiwan.org/english/key/bj/200308/t20030820_113328.htm diakses pada tanggal 27 Oktober 2012

¹² John Pomfret, *China Threatens to Blacklist Taiwanese Traders*, Washington Post, edisi Sabtu, 3 Juni 2000, <http://www.sfgate.com/politics/article/Cina-Threatens-to-Blacklist-Taiwanese-Traders-2756715.php> diakses pada tanggal 2 April 2013

¹³ *Taiwan Leader Calls for End of Unification Council*, The New York Times, Edisi 31 Januari 2006, http://www.nytimes.com/2006/01/31/international/asia/31cnd-taiwan.html?_r=0, diakses pada tanggal 26 Februari 2013

Kuomintang juga menggelar *mass parade* pada tanggal 12 Maret 2006 sebagai bentuk protes dari keputusan pembubaran Dewan Unifikasi.¹⁴

Kebijakan yang diambil oleh Presiden Chen membuat hubungan antara Taiwan dan Cina semakin memanas, karena Cina menganggap Taiwan sedang berusaha untuk mendeklarasikan kemerdekaannya, sehingga presiden Chen dilabeli sebagai *trouble maker* oleh Cina¹⁵. Untuk meredakan kondisi yang mencekam tersebut, pemimpin Partai KMT pada masa itu, Lien Chan¹⁶, berkunjung ke Beijing untuk bertemu dengan Hu Jin Tao, Presiden Cina, dalam rangka membicarakan perluasan hubungan ekonomi terkait perdagangan. Langkah ini sukses untuk menormalisasi hubungan Taiwan dan Cina.¹⁷. Fakta-fakta diatas sekaligus menunjukkan ada pengaruh persaingan dua partai politik dominan di level domestik Taiwan dalam penetapan kebijakan unifikasi Taiwan-Cina, dan hal ini menimbulkan pengaruh pula terhadap sikap Cina terhadap Taiwan.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang dianalisa dalam skripsi ini adalah perbedaan kebijakan luar negeri dalam kerangka persaingan politik dua partai politik dominan di Taiwan untuk merespon persoalan unifikasi Taiwan-Cina. Selama ini pakar Hubungan Internasional banyak membahas tentang penyebab dari kegagalan unifikasi

¹⁴ Kerry Dumbaugh, *Taiwan: Overall Developments and Policy Issues in the 109th Congress*, Congressional Research Service, 17 September 2008, hal 5

¹⁵ *Cina Brands Chen 'trouble maker'*, BBC News, Edisi Rabu, 8 Februari 2013 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4692134.stm> diakses pada tanggal 26 Februari 2013

¹⁶ Dalam kunjungannya tahun 2005, Lien Chan menyatakan bahwa ia berada dalam posisi yang sama, yakni mendukung adanya consensus 1992 dan menentang adanya kemerdekaan.

¹⁷ *President Hu said, "the two sides should resume talks on an equal footing as soon as possible"*, dalam "*Cina Call for Talks with Taiwan*", BBC News, Edisi Minggu, 16 April 2006, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4913428.stm> diakses pada tanggal 27 Februari 2013

Taiwan ke Cina adanya permasalahan historis serta faktor ekonomi kedua negara. Tapi sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu persaingan politik domestik, dalam hal ini antara Partai Kuomintang dan Partai DPP.

Sesuai fungsinya, partai politik sebagai *Goal formulator*, memainkan peran dalam proses mencari kekuasaan dengan cara memformulasikan program – program pemerintah melalui konferensi, konvensi, manifestasi pemilu yang tentu saja bertujuan untuk menarik dukungan¹⁸. Pada kasus Taiwan, untuk menarik dukungan publik, partai politik telah memanfaatkan isu unifikasi guna memenangkan suara terbanyak dalam pemilu. Isu unifikasi masih dijadikan alat untuk menarik dukungan sampai sekarang, sehingga dapat disimpulkan isu ini akan terus mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan pada partai politik yang memerintah. Nyatanya kedua kubu, *Pan Blue Coalition* dan *Pan Green Coalition*, tidak menemukan kata sepakat dan selalu mempunyai pandangan yang berbeda tentang kebijakan unifikasi Taiwan-Cina.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan yang hendak dijawab melalui skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh persaingan dan perbedaan politik di Taiwan terhadap kebijakan luar negerinya dalam menanggapi permasalahan unifikasi?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan kebijakan dibawah pemerintahan yang dikuasai oleh Partai Kuomintang dan Partai DPP?

¹⁸ Andrew Heywood, *Politics*, (New York: Pallgrave Macmillan, 2002) hal 236-237

3. Bagaimana akibat perbedaan Partai KMT dan Partai DPP terhadap hubungan Taiwan-Cina dan perilaku unifikasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan persaingan politik antar dua partai yang berpengaruh di Taiwan dalam konteks isu unifikasi dan hubungan Taiwan dengan Cina.
2. Menjelaskan perbedaan posisi partai Kuomintang dan Partai DPP tentang unifikasi dan kebijakan luar negeri masing-masing yang diarahkan terhadap Cina.
3. Menganalisa dampak dari adanya perbedaan tersebut terhadap masa depan unifikasi dan masalah-masalah lainnya yang terkait dengan isu unifikasi Taiwan dan Cina, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan kedua negara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan kemampuan penulis dalam menjalankan aktivitas dan usaha-usaha penelitian dan merumuskan analisa dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai akademisi.
2. Menambah informasi tentang permasalahan politik di kawasan Asia Timur, tentang hubungan antara politik domestik dan politik internasional dalam penanggulangan permasalahan konflik dan pencapaian kepentingan nasional.

1.6 Studi pustaka

Susan V. Lawrence dan Michael F. Martin dalam tulisannya yang berjudul *Understanding China's Political System*¹⁹, menjelaskan bagaimana Partai Komunis Cina sebagai partai yang dominan telah menguasai Cina lebih dari enam dekade. Partai ini tidak hanya dominan dalam kenegaraan saja tapi juga mempengaruhi masyarakatnya. Partai ini mengontrol empat pilar yaitu masyarakat, *People's Liberation Army*, media, aparat pada pengadilan dan keamanan internal. *National People Congress* (NPC) yang tertuang pada pasal 57 UU Cina, merupakan organ tertinggi dalam pemerintahan. Namun, pada kenyataannya badan ini juga dikontrol oleh partai komunis Cina dan segala hal yang berhubungan dengan lembaga ini berada dibawah pengawasan partai dominan ini. Partai ini juga mengontrol perusahaan – perusahaan privat maupun perusahaan asing, ini terbukti dengan adanya 400.000 anggota partai hadir dalam perusahaan tersebut.

Sejak pemerintahan berada di tangan Partai Komunis, partai dan pemerintahan dioperasikan sebagai salah satu bagian atau kesatuan yang sesuai dengan slogannya *the party's absolute and unified leadership*. Tapi sejak akhir tahun 1970an, partai Komunis mulai memisahkan antara fungsi partai dan pemerintah. Mereka memberikan sedikit legitimasi pada kabinet, *state council*, departemen pemerintahan ditingkat bawah untuk mengelola administrasi sehari – hari. Walaupun demikian, partai tetap mengontrol pemerintahan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai

¹⁹ Susan V. Lawrence dan Michael F. Martin, *Understanding China's Political System*, Congressional Research Service, May 10, 2012

yang direncanakan. Hal ini bisa dilihat bahwa anggota partai berada dalam kabinet, *state council*, departemen pemerintahan.

Di Malaysia, partai politik juga mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat di negara itu. Ho Khai Leong dalam tulisan yang berjudul *Dynamics Of Policy Making In Malaysia: The Formulation of The New Economic Policy and The National Development Policy*, menjelaskan bagaimana pembuatan kebijakan di Malaysia, sama seperti negara dunia ketiga lainnya, yang pada dasarnya terpusat. Pada tahap perancangan kebijakan masih terbuka untuk *opini public*, tapi dalam proses pembuatannya dipengaruhi oleh kelompok kepentingan dan dalam proses pengevaluasian kebijakan tersebut selalu terpusat dan penuh dengan kerahasiaan. Ini menunjukkan bahwa input dan output kebijakan, secara sistematis ditentukan oleh birokrasi pemerintah sebelum kebijakan tersebut didebat dan didiskusikan di ranah publik. Dan partai politik yang berkuasa tidak dapat dilepaskan dalam proses-prosesnya²⁰.

Pemerintahan Malaysia mengacu kepada koalisi partai politik yang berdasarkan partai politik etnik, pada tahun 1957-1972, menjadi partai penguasa yang terdiri dari *United Malays National Organization (UMNO)*, *the Malaysian Chinese Association (MCA)*, and *the Malaysian Indian Congress (MIC)*. Partai yang dominan dalam koalisi tersebut adalah UMNO. Sebagai sebuah parlemen yang terbentuk setelah *British System*, maka Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas proses pembuatan kebijakan dan sebagai pengontrol kebijakan. Dalam prakteknya, Perdana

²⁰ Ho Khai Leong, *Dynamics Of Policy Making In Malaysia: The Formulation Of The New Economic Policy And The National Development Policy*, Asian Journal Of Public Administration Vol.14 No.2 (Dec 1992): 204-227

Menteri ini biasanya berasal dari UMNO sehingga Perdana Menteri ini didukung oleh birokrat-birokrat yang dominan dari etnik melayu.

Selanjutnya, dalam tulisan Jose Antonio Crespo yang berjudul *The Liberal Democratic Party in Japan: Conservative Domination*²¹, menggambarkan bahwa sistem partai di Jepang sering dianggap sebagai sistem partai dominan, dimana dalam setiap pemilihan, partai yang sama selalu memenangkan pemilu dari periode ke periode selanjutnya. Dalam kasus ini, Partai Liberal Demokratik Jepang dibentuk melalui dua fusi partai konservatif pada tahun 1955. Jose Antonio Crespo menyebutkan pengambilan keputusan di Jepang dipengaruhi oleh tiga sektor dasar yaitu partai yang berkuasa, birokrasi, *the upper echelon of the business class*. Secara umum partai konservatif sangat pro terhadap bisnis internasional dalam kebijakannya. Oleh karena itu, banyak kebijakan pada masa kekuasaan Partai Liberal Demokratik diorientasikan untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui free trade. Namun, hal ini jugalah yang menyebabkan jatuhnya rezim kekuasaan ini karena maraknya korupsi yang terjadi di dalam partai tersebut.

Partai politik berguna untuk menentukan bagaimana suatu negara dapat dilihat dari luar. Tulisan *Diane K. Mauzy and R.S. Milne* yang berjudul *Singapore Politics Under The People Actions party*²² menjelaskan bahwa Singapura memakai sistem multipartai, namun hanya ada satu partai yang dominan, yang mempunyai kapasitas

²¹ Jose Antonio Crespo, *The Liberal Democratic Party in Japan: Conservative Domination*, *International Political Science Review / Revue internationale de science politique*, Vol. 16, No. 2, *Party Government: The Search for a Theory. Le gouvernement de parti: à la recherche d'une théorie* (Apr., 1995), pp. 199-209

²² Diane K. Mauzy and R.S. Milne, *Singapore Politics Under The People Actions party*, London: Routledge, 2002

untuk memerintah. Partai dominan ini harus bertanggung jawab kepada grup-grup politik dan publik, untuk memastikan legitimasinya dan melanjutkan dominasinya.

Walaupun para pemimpinnya cenderung *elitis*, pada dasarnya *People Actions party* yang non ideologis siap untuk menyelamatkan Singapura, dengan membentuk suatu keputusan yang disukai oleh masyarakatnya, dan menyediakan orang-orang terbaiknya yang mampu memimpin dan membuat keputusan dengan baik. Sebagai partai penguasa mereka juga mengontrol media dalam mempengaruhi opini publik. *Elitism* juga membawa partai ini untuk membiasakan diri dalam menjadikan kabinet sebagai pusat untuk mendiskusikan ide-ide dan mengembangkan kebijakan dan tidak menggunakan partai sebagai forum untuk diskusi. *Elitism* juga mewarnai kebijakan partai ini lebih banyak di bidang edukasi. *People Actions party* melihat bahwa edukasi adalah hal yang paling penting dalam kelangsungan suatu sistem di negara, misalnya kebijakan tentang wajib baca dan tulis bagi setiap warga di Singapura, kemudian pengaplikasian sistem *bilingual* atau dua bahasa di sekolah – sekolah, dan pengembangan *science* dan teknologi demi kemajuan bangsa.

Berbeda yang terjadi di Thailand, dimana politik Thailand sangat dipengaruhi oleh aspek bisnis. Dalam jurnal yang ditulis oleh *Anek Laothamatas* yang berjudul *Business and Politics in Thailand: New Patterns of Influence*²³. Politik Thailand dijalankan dengan adanya pengambilan keputusan ditangan segelintir elit birokrat. Namun dengan mengintegrasikan kelompok-kelompok bisnis, Thailand menikmati pembangunan ekonomi-sosial yang sangat cepat, yang menyebabkan jatuhnya rezim

²³ Anek Laothamatas, *Business and Politics in Thailand: New Patterns of Influence*, Asian Survey, Vol. 28, No. 4 (Apr., 1988), pp. 451-470

militer oleh kelompok non birokratik sehingga Thailand pada masa itu mencapai stabilitas baru dengan sistem yang disebut rezim “semidemokratik” Ini adalah sistem yang wujudnya sebuah koalisi militer, birokrat, serta elit. Di bawah rezim ini muncul dua bentuk pengaruh politik, *pertama*, meningkatnya partisipasi langsung dalam parlemen dan kabinet melalui pemilihan umum dan adanya dukungan dari berbagai partai. *Kedua*, lobi-lobi sektor swasta dalam JPPCS (*Joint Public-Private Consultative Committees*)

Anek Laothamatas menjelaskan pada masa lampau, pengusaha umumnya menahan diri dari untuk ikut berpartisipasi secara terbuka dan langsung dalam pemerintahan atau politik. Berbeda dengan masa ini, tiga partai penguasa seperti *Chat-Thai*, *Social Actions*, dan *Democrat* semakin dikendalikan oleh perusahaan – perusahaan besar. Bahkan Partai Demokrat yang menjadi andalan bagi masyarakat golongan menengah, kini dikendalikan oleh perusahaan – perusahaan besar. Oleh karena itu, kelompok-kelompok bisnis yang menjadi politisi di parlemen melalui partai-partai sangat mudah untuk mempengaruhi kebijakan dalam rangka mencapai kepentingan mereka, misalnya saja “dua” Tejapaibools, seorang pebisnis yang masuk ke parlemen, dalam jangka waktu setahun, ia telah mampu untuk menggabungkan dua perusahaan wiskinya di Mekong.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Partai Politik dalam Perumusan Kebijakan Luar Negeri

Partai politik adalah sekelompok orang yang diorganisir untuk suatu tujuan yaitu menjadi penguasa dalam pemerintahan dengan cara memenangkan pemilihan.

Partai politik mempunyai enam fungsi yaitu sebagai *representation* (perwakilan), *elite formation and recruitment*, *goal formulation*, *interest articulation and aggregation*, *socialization and mobilization*, *organization of government*.²⁴

Perumusan kebijakan luar negeri dalam suatu negara merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah, karena berkaitan dengan politik domestik negara tersebut. Kerumitan proses ini disebabkan adanya pengaruh dari aktor-aktor politik dalam negeri terhadap para pengambil keputusan politik luar negeri yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri.

Secara konseptual, peneliti menggambarkan fenomena tersebut dengan *policy influence system*, yakni hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri (*policy influencers*) dengan para pengambil keputusan dalam perumusan politik luar negeri. Hubungan yang terjalin antara keduanya menciptakan adanya hubungan timbal balik, dimana para pengambil keputusan membutuhkan *policy influencers* sebagai pendukung bagi rezim mereka, sedangkan *policy influencers* membutuhkan para pengambil keputusan untuk memperlancar kegiatan politik yang mereka jalankan.²⁵

Dalam proses perumusan politik luar negeri dapat dibedakan empat tipe *policy influencers*, yaitu:²⁶

a. Birokrat yang mempengaruhi (*Bureaucratic Influencers*)

Bureaucratic influencers (birokrat yang mempengaruhi) mengacu kepada berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang

²⁴ Andrew Heywood, *op.cit.*, 236-237

²⁵ William D. Coplin, *Introduction to International politics : a theoretical overview*. Dialih bahasa oleh Marsedes Marbun, Pengantar *Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2003) hal 74-76

²⁶ *Ibid* William D. Colpin, hal 81-91

membantu para pengambil keputusan dalam menyusun, serta melaksanakan kebijakan. Terkadang, anggota birokrasi juga merupakan anggota kelompok pengambil keputusan sehingga sulit untuk menggambarkan garis pemisah yang jelas antara anggota birokrasi yang bertindak sebagai *influencer* dari pengambil keputusan. Namun, hal inilah yang membuat kelompok birokratis berpengaruh dalam proses ini. Kelompok ini memiliki akses langsung kepada pengambil keputusan, karena pengambil keputusan bergantung kepada kelompok birokratis dalam hal informasi yang penting bagi pembuatan kebijakan serta bantuan kelompok ini untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Peranan *Bureaucratic influencers* dalam proses perumusan politik luar negeri, baik dalam sistem politik terbuka maupun sistem politik tertutup tidak jauh berbeda. Dalam kedua sistem politik ini, kelompok-kelompok birokratis ini sering beroperasi di belakang layar melalui pemberian informasi untuk mengambil keputusan serta digunakan sebagai instrument bagi pelaksanaan keputusan tersebut.

b. Partai yang mempengaruhi (*Partisan influencers*)

Tipe *policy influencer* yang kedua adalah partai-partai politik. Influencers ini bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah. Influencers ini berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan menyediakan personel-personel yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan.

Dalam sistem politik tertutup, *partisan influencer* bisa dipandang sebagai kelompok politik yang melanggar hukum maupun sebagai bagian dari sistem satu partai. Apabila ada partai tunggal, seperti negara-negara komunis, maka partai itu biasanya terdiri atas sejumlah faksi yang mempunyai kepentingan serta komitmen ideologis yang berbeda-beda, namun biasanya hal ini dirahasiakan. Tak jarang dalam partai tersebut terjadi perdebatan berbagai isu, ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat, maka perbedaan tersebut terjadi sebelum keputusan akhir berhasil dicapai, biasanya hal seperti ini tidak diumumkan karena perdebatan tersebut tidak bersifat terbuka dan norma-norma kepartaian tidak memperkenankan adanya suara oposisi. Oleh karena itu, posisi *partisan influencer* dalam sistem politik tertutup ini berada dalam posisi yang agak mirip dengan kelompok birokratik, karena mereka dapat mempengaruhi kebijakan ketika kebijakan tersebut belum diputuskan secara resmi.

Berbeda dengan sistem politik terbuka, dimana dengan mudah dapat ditemukan *partisan influencers*. *Influencers* ini mungkin saja tergabung dalam dalam suatu koalisi yang terdiri dari dua partai atau lebih. Namun, baik dalam sistem dua partai ataupun sistem multipartai biasanya terdapat berbagai macam pandangan yang dikemukakan terhadap suatu isu. Jika disiplin kepartaian lemah, maka perbedaan pandangan tersebut akan diekspresikan secara terbuka dan pemberian suara di lembaga legislatif harus ditiadakan tanpa mempertimbangkan garis-garis kepartaian. Sebaliknya, jika disiplin kepartaian kuat, maka perbedaan-perbedaan pandangan tersebut mungkin dihasilkan dalam perdebatan di dalam partai dan jarang terjadi pada pemberian suara untuk menentang kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh partai.

Kemampuan *partisan influencer* mempengaruhi proses perumusan tersebut sangat terbatas. Terhadap semua negara demokrasi, peran terbatas dimainkan dalam menyetujui atau menolak tindakan-tindakan politik luar negeri yang diprakarsai oleh para pengambil keputusan politik luar negeri, meskipun dalam jangka panjang, mereka mungkin untuk mengubah sikap masyarakat melalui perdebatan umum. Keterbatasan ini disebabkan adanya kecenderungan dari *partisan influencer* untuk lebih memperhatikan politik dalam negeri ketimbang politik luar negeri. Meskipun demikian, posisi *partisan influencer* ini di negara demokrasi tidak bisa dipandang sebelah mata, karena walaupun peran mereka terbatas dalam mempengaruhi proses perumusan tersebut, para pengambil keputusan ini tetap membutuhkan dukungan mereka untuk memelihara rezim, yang diupayakan dengan mendapat persetujuan dalam keputusan –keputusan politik luar negeri.

c. Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Influencers*)

Tipe yang ketiga ini terdiri dari sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi aktivitas kelompok partai. Seringnya, kepentingan disini bersifat ekonomis, walaupun tak jarang juga ada kepentingan-kepentingan non-ekonomis yang memotivasi munculnya tindakan kolektif ini.

Dalam sistem politik tertutup, *interest influencers* ini harus beroperasi di belakang layar, terutama di negara-negara yang menganut sistem satu partai, karena biasanya *interest influencers* ini tidak mampu untuk mengejar keinginan mereka

secara terbuka, disebabkan adanya peraturan secara implisit dalam sistem politik yang tidak memungkinkan adanya keberagaman kepentingan.

Sedangkan dalam sistem politik terbuka, kelompok ini memainkan peran yang lebih besar. Biasanya terdapat banyak organisasi dan kelompok informal yang mewakili berbagai kepentingan yang bersifat ekonomis dan non ekonomis, karena kelompok ini memiliki sumber-sumber finansial yang besar sehingga mereka mampu mempengaruhi para pemilih dan partisan influencer. Ada kecenderungan organisasi ini berkembang melalui isu politik tertentu, karena dalam sistem demokratis, hak untuk memprotes diakui sehingga dengan mudah menemukan orang-orang yang berada pada posisi yang sama. Maka dari itu, mereka dengan mudah mengorganisasikan tekanan terhadap *interest influencers* dan pengambil keputusan yang lain. Walaupun demikian, *interest influencers* ini tidak bisa mendikte politik luar negeri, kelompok ini sering terbatas dalam menggunakan tekanan atau mengabaikan masalah kepada siapa tekanan harus diarahkan agar menguntungkan.

d. Massa yang mempengaruhi (*mass influencers*)

Tipe *policy influencers* yang terakhir adalah opini publik atau *mass influencers*. Dalam hal ini mengacu kepada iklim opini yang dimiliki oleh populasi yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan saat merumuskan politik luar negeri. Sehingga akan terlihat bagaimana dampak dari sikap *mass influencers* yang sangat beragam bagi pengambil keputusan luar negeri.

Dalam sistem politik yang tertutup, sikap masyarakat sangat dipengaruhi oleh para pengambil keputusan itu sendiri. Dengan menggunakan media komunikasi masa,

para pengambil keputusan membangun iklim opini yang mendukung kebijakan-kebijakan luar negeri mereka. Namun, pada suatu waktu, para pengambil keputusan harus secara cermat memupuk iklim opini agar pada kesempatan selanjutnya tidak ada peluang bagi rakyat untuk mengubah kebijakan tersebut. Namun, karena media massa dikontrol pemerintah dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat biasanya dibatasi melalui sensor, maka manipulasi para pengambil keputusan dalam sistem politik tertutup lebih besar dibanding negara-negara yang menganut sistem politik terbuka.

Dalam sistem politik terbuka, iklim opini terbebas dari manipulasi langsung para pengambil keputusan. Dalam negara demokrasi, rakyat menerima informasi dari berbagai sumber sehingga tidak memungkinkan terjadinya penataan berita dengan cara menyembunyikan informasi tertentu seperti dalam sistem politik tertutup.

Dalam proses perumusan kebijakan, para pengambil keputusan memerlukan *mass influencers* dalam sistem politik terbuka, karena peran mereka dalam pemilu. Para pengambil keputusan memformulasikan kebijakan-kebijakan dengan memperhitungkan efeknya terhadap opini publik, serta pemilu berikutnya. Seringnya, opini publik dijadikan alat oleh pengambil keputusan dan *policy influencers* lainnya, seperti suatu kekuatan yang mengarahkan para pengambil keputusan. Para pejabat tersebut menggunakan opini public untuk merasionalisasi tindakan-tindakan politik luar negeri bukan untuk membentuk kebijakan.

Penelitian ini fokus pada *policy influencers* tipe kedua yaitu *partisan influencers*. Dalam negara demokrasi, seperti Taiwan, partai politik berfungsi sebagai

penopang sistem demokrasi tersebut. Dengan menjalankan fungsinya sebagai *interest articulation and aggregation*, partai politik mengumpulkan dan mengemukakan kepentingan masyarakat yang beraneka ragam dan menjadikannya sebagai tuntutan politis kepada pemerintah terkait kebijakan yang dirumuskan (input).

Namun, peran terbatas yang dimiliki oleh partai politik untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan luar negeri ini, membuat partai politik memaksimalkan fungsinya sebagai *elite formation and recruitment*, dimana partai politik memiliki peran untuk merekrut individu-individu sebagai kader-kader partai politik yang akan ditawarkan karir di level struktural sebagai perwakilan partai politik tersebut. Individu-individu yang merupakan kader partai politik inilah yang digunakan sebagai jembatan bagi partai politik untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan, agar kebijakan yang diadopsi sesuai dengan kepentingan partai politik tersebut²⁷.

Hal ini sama halnya dengan Taiwan, dimana dua partai politik dominan yaitu Partai KMT dan Partai DPP mempunyai kader-kader politik yang direkrut untuk berkarir di legislatif dan eksekutif. Kader-kader politik yang telah direkrut tersebut harus mengikuti proses pemilihan umum. Oleh sebab itu, saat pemilihan umum anggota Legislatif Yuan Taiwan berlangsung, kader-kader dari partai KMT dan partai DPP telah dipersiapkan sebaik mungkin untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif agar salah satu dari partai politik tersebut dapat memiliki kursi terbanyak di legislatif Yuan sehingga partai politik pemenang kursi terbanyak akan mengontrol jalannya

²⁷ J.A Corry dan Henry J. Abraham, *Elements of Democratic Government*, Oxford University Press, 1958, hal 273. Dikutip Oleh Drs. Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 9

pemerintahan serta memberi pengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan. Biasanya pemilihan anggota parlemen di Legislatif Yuan Taiwan ini berlangsung selama empat tahun sekali²⁸.

1.7.2 Zero Sum Game Model

Dalam sistem pemerintahan yang demokrasi terdapat persaingan antara partai-partai politik. Persaingan tersebut tentunya membutuhkan strategi sehingga kepentingan – kepentingan yang telah diformulasikan dapat dicapai oleh partai politik tersebut. Hal ini dijelaskan dalam teori permainan atau *game theory*, dimana aktor-aktor tersebut berusaha bertindak secara rasional dalam mengkalkulasikan untung-ruginya dan seringkali aktor-aktor tersebut cenderung berhadapan dengan aktor lain karena berbeda pandangan atau kepentingan. Untuk mencapai kesepakatan, aktor tersebut cenderung untuk membentuk koalisi diantara mereka melalui partai politik demi tercapainya kepentingan yang ingin mereka raih. Interaksi aktor – aktor tersebut tercermin dalam *zero- sum model*, dimana aktor-aktor tersebut bertemu dengan posisi yang berbeda dan mempunyai kemungkinan menang dan kalah, apabila salah satu aktor mengalami banyak kemenangan, maka pesaing aktor akan mengalami kerugian yang amat besar pula. Strategi yang dilakukan oleh kedua aktor untuk mencapai keuntungan sebanyak mungkin dengan cara merugikan pesaingnya. Sangat jarang

²⁸*Legislative Yuan*, <http://www.taiwanembassy.org/ct.asp?xItem=201082&CtNode=2244&mp=1&xp1=> diakses pada tanggal 5 April 2013

terjadi kompromi diantara aktor tersebut, karena sangat kecil kemungkinan untuk bekerja sama.²⁹

Taiwan mengadopsi sistem *two-party dominance*, dimana sistem ini menonjolkan dua partai politik yang dominan di Taiwan, karena keduanya merupakan partai yang dominan maka sangat sulit bagi keduanya untuk mencapai kata sepakat. Hal ini disebabkan karena Partai KMT dan Partai DPP mempunyai posisi dan *platform* yang berbeda namun mempunyai kepentingan yang sama di pemerintahan yakni mencapai kekuasaan sehingga terjadinya persaingan diantara kedua partai tersebut. Dalam mencapai kepentingan tersebut, kedua partai berusaha untuk meningkatkan kualitas kader-kader partai juga menentukan pilihan kebijakan yang bisa menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga dapat menarik dukungan untuk meningkatkan angka pemilih pada pemilu.

1.7.3 Two Level Games

Penulis menggunakan konsep *two level analysis*, karena melihat adanya keterkaitan antara faktor domestik dan internasional yang saling mempengaruhi satu dan yang lainnya³⁰. Konsep *two level analysis* dikembangkan oleh Robert Putnam. Ia mengemukakan bahwa proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipahami melalui dua tingkat permainan, yaitu domestik dan internasional.

Putnam menjelaskan bahwa pada level domestik (level II), kelompok – kelompok domestik akan berusaha mengejar kepentingan mereka dengan cara

²⁹ Duncan Snidal, *The Game Theory of International Politics*, World Politics, Vol. 38, No. 1 (Oct., 1985), hal 38-40

³⁰ Robert D. Putnam, *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games*, International Organization, Vol. 42, No. 3 (Summer, 1988), hal 427

menekan pemerintah agar pemerintah mengadopsi kebijakan yang menguntungkan kelompok tersebut dan politisi yang mencari kekuasaan akan membangun koalisi bersama kelompok-kelompok tersebut. Kemudian pada level internasional (level I), pemerintah berusaha untuk memaksimalkan kemampuan mereka untuk mengatasi tekanan domestik sambil meminimalisir konsekuensi yang dapat merugikan.³¹

Kedua level tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini dijelaskan oleh Putnam bahwa pentingnya *winsset*³² demi tercapainya keberhasilan di level internasional. Keterkaitan antara kedua level tersebut terlihat bahwa semakin besar kesepakatan yang tercapai di level domestik maka akan semakin besar pula *winsset* di level I mencapai keberhasilan, tapi sebaliknya, semakin rumit proses penyetujuan kebijakan di level domestik akan melemahkan posisi tawar di level internasional.³³

Permainan di level domestik Taiwan digambarkan melalui persaingan dua partai, yaitu Partai Kuomintang dan Partai DPP. Masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap status Taiwan. Kebijakan apa yang menguntungkan kekuasaan partainya itulah yang akan dipilih. Sekalipun juga ada faktor yang membuat mungkin terjadinya kesepakatan, kedua partai tersebut, misalnya dengan membangun koalisi seperti yang diciptakan sebelumnya melalui *Pan Blue Coalition* dan *Pan Green Coalition*. *Pan Blue Coalition* adalah koalisi partai-partai yang sejalan dengan Partai Kuomintang yang mendukung adanya upaya pendekatan dengan Cina, sedangkan *Pan Green Coalition* adalah koalisi partai-partai

³¹ *Ibid* hal 434

³² *Winsset* adalah level keberhasilan yang harus dicapai dalam membuat kesepakatan di level domestik.

³³ Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr, *Understanding Foreign Policy Decision Making*, (New York: Cambridge University Press, 2010) hal 133-134

yang sejalan dengan Partai DPP yang menginginkan adanya kemerdekaan Taiwan. Kedua kelompok koalisi ini sekaligus berfungsi sebagai faktor penentu untuk politik domestik. Asumsinya jika keduanya siap mendukung salah satu maka berkemungkinan akan tercipta kesepakatan.

Masalahnya adanya dua kubu besar di Taiwan, membuat proses-prosesnya menjadi rumit, bisa memperuncing masalah yang ada sehingga *winset* sangat sulit tercapai. Kerumitan proses pembentukan kesepakatan ini tercermin dengan adanya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Cina dan AS di level internasional. Sebagai koalisi tiap-tiapnya berkepentingan terhadap pemerintahan yang mengadopsi kebijakan yang memberikan keuntungan bagi mereka.

1.8 Metodologi

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis³⁴. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu³⁵.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan arti dari permainan politik di dua tingkat dihubungkan dengan fakta-fakta yang dapat diamati. Deskripsi dipakai sebagai teknik untuk menjelaskan.³⁶ Analisa deskriptif dipakai untuk memaparkan secara objektif apa yang ada dan terjadi pada politik Taiwan di dua tingkat permainan, tanpa

³⁴ Prof. Dr. Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Hal 41

³⁵ Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011)

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal.6

bermaksud untuk memberikan penilaian mana yang lebih baik atau ideal untuk Taiwan. Deskripsi kualitatif dimaksudkan sebagai cara menafsirkan data dan informasi, yaitu dengan interpretasi, tanpa melakukan pengujian lebih lanjut untuk menetapkan mana yang mejadi komponen-komponen analisa yang paling bermakna untuk penyelesaian masalah politik Taiwan dengan Cina maupun unifikasi. Rangkaian informasi disusun menurut fakta-fakta yang dikumpulkan untuk memastikan objektivitasnya.

1.8.1. Batasan Penelitian

Fakta-fakta yang dikumpulkan berkisar pada kurun waktu 2000-2012. Batasan ini dipilih karena mulai tahun 2000 Partai DPP berkuasa hingga tahun 2008 yang kemudian dilanjutkan oleh Partai Kuomintang pada tahun 2008 hingga sekarang.

1.8.2. Unit analisa dan tingkat analisa

Unit analisa merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan³⁷. Penelitian ini menggunakan partai politik (kelompok) sebagai unit analisa dan tingkat analisisnya adalah negara. Pelaku lain yang terkait dalam analisa, semisal Cina, pada akhirnya juga merupakan unit sendiri, yang dipengaruhi oleh politik didalam negerinya. Sekalipun di level internasional sikap dan posisi Cina maupun Taiwan bisa mempengaruhi perkembangan hubungan dalam kawasan, tetap saja dalam hubungan politik digerakan oleh tuntutan dari dalam negeri.

³⁷ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional – Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta:LP3ES, 1990) hal 35

1.8.3. Teknik Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisa Data

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder, yakni data-data dan informasi yang secara keseluruhan diambil dari temuan-temuan yang dihasilkan pihak lain. Data ini didapat dari situs-situs resmi pemerintahan di Taiwan, seperti MOFA (*Ministry of Foreign Affairs*) Taiwan, badan legislatif dan eksekutif Taiwan, kemudian situs media massa internasional, seperti BBC, New York Times, Taipei Times. Disamping itu, penulis juga menggunakan referensi dari penelitian-penelitian, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, dan juga situs-situs yang membahas tentang objek penelitian. Data-data yang diperoleh beranekaragam sehingga dalam penelitian ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas data guna mendukung pendapat dan alasan-alasan penulis. Selanjutnya, data-data tersebut diolah untuk menghasilkan serangkaian jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Sebelum menganalisa data yang diperoleh, peneliti melakukan pengumpulan *literature* mengenai kondisi politik di Taiwan baik dari segi sejarah maupun sistem politik Taiwan itu sendiri. Hal ini penulis lakukan guna mendapatkan gambaran awal mengenai permasalahan yang penulis hendak teliti. Untuk mendapatkan informasi tersebut diatas, penulis tidak menemukan sumber dan bahan dalam bahasa Indonesia sehingga penulis harus memahami dalam sumber-sumber berbahasa Inggris. Selain itu, sumber-sumber tersebut sangat sulit penulis temukan di Perpustakaan Pusat UNAND maupun toko buku di Padang. Penulis mendapatkan salah satu sumber berupa buku yang ditulis oleh John F. Copper yang berjudul *Taiwan Nation State or Province* yang diterbitkan pada tahun 2009, buku ini didapat melalui situs online

(en.bookfi.org). penulis juga mendapatkan sumber-sumber pendukung melalui situs (libgen.org). Selain itu, penulis juga mendapatkan jurnal-jurnal ilmiah melalui situs resmi j-stor (www.jstor.org) serta sage publication (www.sagepub.com). Melalui jurnal-jurnal ilmiah tersebut, penulis juga mendapatkan banyak informasi yang berupa temuan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut penulis tuliskan pada bab III. Meskipun demikian, penulis juga melakukan seleksi terhadap informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian yang merujuk pada batasan masalah pada penelitian ini. Dari data-data tersebut jugalah penulis melakukan analisa pada bab IV, dimana analisa tersebut mengacu kepada pertanyaan penelitian yang hendak peneliti jawab pada penelitian ini. Hal ini penulis lakukan semata-mata agar penelitian ini dapat membentuk suatu pemahaman yang logis dan sistematis.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Menggambarkan secara keseluruhan tentang permasalahan penelitian yang akan diteliti, sebagai pengantar yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, konsep-konsep yang dipakai untuk sebagai pisau analisa, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II Sistem Politik dan Posisi Partai Politik dalam Perumusan Kebijakan Luar Negeri di Taiwan

Bab ini berisi tentang deskripsi dari sejarah politik Taiwan, sistem politik, sistem kepartaian, dan posisi partai politik dalam lembaga yang berkaitan dengan perumusan kebijakan luar negeri Taiwan.

**BAB III Sikap dan Kebijakan Partai KMT dan Partai DPP Dalam Merespon
Persoalan Unifikasi**

Menjelaskan tentang usaha Partai KMT dan DPP dalam mencapai tujuannya terkait permasalahan unifikasi.

**BAB IV: Pengaruh Persaingan Partai KMT dan Partai DPP terhadap Unifikasi
Taiwan-Cina**

Analisis persaingan partai KMT dan Partai DPP terhadap unifikasi dan akibatnya terhadap sikap Cina kepada Taiwan.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran pada penelitian ini,